

Perubahan Renja Awal

2023

BIRO ORGANISASI



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja dapat dilakukan perubahan. Sebagaimana tertulis pada Pasal 343 ayat (1) bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan yang meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selanjutnya pada Pasal 360 ayat (2) disebutkan Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan pada ayat (3) disebutkan Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 050/385/VI/P2EPD/Bappeda-2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023, melakukan penyusunan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2023 yang pada akhirnya nanti digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);

- 15) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 16) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
- 17) Keputusan Gubernur Sumatera Nomor 489-24-2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
- 18) Surat Edaran Gubernur Nomor: 050/385/V/P2EPD/Bappeda-2023 tentang Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud Rancangan Perubahan Renja Awal Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah memberikan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan triwulan berikutnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2023 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- 2) Menyediakan acuan bagi Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2023 secara terpadu, terarah dan terukur;

- 3) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Sumatera Barat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Perubahan Renja Awal Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan perubahan Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II

Memuat penjelasan tentang pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2023;

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang mengalami perubahan berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023;

BAB IV Penutup

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Renja dan rencana tindak lanjutnya.

B A B II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2023 sebagaimana dimaksud selain untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program, implikasi yang timbul serta tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Hasil evaluasi Renja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Nama OPD : Biro Organisasi

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | | | | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALANAN (TAHUN 2023) YANG DIEVALUASI | | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 | |
|-----------------|--|---|---|-----------|------------|---|--|----------------------|---|--------------------------|---|--------------------|
| | | | | | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | ANGGARAN (Rp) | REALISASI KINERJA | REALISASI ANGGARAN (Rp.) | % CAPAIAN KINERJA | % CAPAIAN ANGGARAN |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 01 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100% | 1.347.881.904 | 50% | 660.224.080 | 50,00 | 48,98 |
| 4 01 01 1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | 100% | 9.671.500 | 50% | 6.929.600 | 50,00 | 71,65 |
| 4 01 01 1 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | 1 Dokumen | 1.533.000 | 1 Dokumen | 1.517.500 | 100,00 | 98,99 | | | |
| 4 01 01 1 04 | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun | 1 Dokumen | 1.669.600 | 1 Dokumen | 1.666.000 | 100,00 | 99,78 | | | |
| 4 01 01 1 06 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun | 1 Dokumen | 4.503.500 | 1 Dokumen | 2.749.700 | 100,00 | 61,06 | | | |
| 4 01 01 1 07 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Daerah yang disusun | 1 Dokumen | 1.965.400 | 1 Dokumen | 996.400 | 100,00 | 50,70 | | | |
| 4 01 01 1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 68.635.000 | 50% | 26.308.000 | 50,00 | 38,33 |
| 4 01 01 1.02 02 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Honor | 7 Orang | 68.100.000 | 6 Orang | 25.935.000 | 85,71 | 38,08 | | | |
| 4 01 01 1.02 04 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan keuangan bulanan /triwulanan/semesteran yang disiapkan | 1 Laporan | 535.000 | 2 Laporan | 373.000 | 200,00 | 38,08 | | | |
| 4 01 01 1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 1.806.500 | 50% | 1.806.500 | 50,00 | 100,00 |
| 4 01 01 1.03 04 | | Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Dokumen hasil pemantauan dan penertiban | 1 Dokumen | 1.148.600 | 1 Dokumen | 1.148.600 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | | | Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya | 1 Orang | | 1 Orang | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 4 01 01 1.03 06 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Dokumen Laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD | 1 Dokumen | 657.900 | 1 Dokumen | 657.900 | 100,00 | 100,00 | | | |
| 4 01 01 1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100% | 10.000.000 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 01 01 1.05 11 | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bimtek yang diikuti | 1 Bimtek | 10.000.000 | Bimtek | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALANAN (TAHUN 2023) YANG DIEVALUASI | | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 | |
|---------------------|--|---|--|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------|
| | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | ANGGARAN (Rp) | REALISASI KINERJA | REALISASI ANGGARAN (Rp.) | % CAPAIAN KINERJA | % CAPAIAN ANGGARAN |
| 4 01 01 1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 721.680.280 | 50% | 356.889.300 | 50,00 | 49,45 |
| 4 01 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan | 31 Bahan | 31.675.000 | 8 Bahan | 16.635.100 | 25,81 | 52,52 |
| 4 01 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 12 Barang | 35.024.700 | 6 Barang | 15.512.200 | 50,00 | 44,29 |
| 4 01 01 1.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan hasil koordinasi dan Konsultasi | 100 Laporan | 654.980.580 | 34 Laporan | 324.742.000 | 34,00 | 49,58 |
| 4 01 01 1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 362.918.580 | 0 | 202.350.000 | 0,00 | 55,76 |
| 4 01 01 1.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel baru yang disediakan | 31 Unit set | 151.313.300 | Unit set | | 0,00 | 0,00 |
| 4 01 01 1.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Baru | 17 Unit | 211.605.280 | 14 Unit | 202.350.000 | 82,35 | 95,63 |
| 4 01 01 1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 85.140.044 | 50% | 37.140.680 | 50,00 | 43,62 |
| 4 01 01 1.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun | 500 Surat | 8.187.500 | 518 Surat | 6.184.250 | 103,60 | 75,53 |
| 4 01 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Kapasitas tagihan internet yang dibayarkan | 12 Bulan | 3.000.000 | Bulan | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 01 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Tenaga Pelayanan Umum kantor yang tersedia | 2 Orang | 73.952.544 | 2 Orang | 30.956.430 | 100,00 | 41,86 |
| 4 01 01 1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 88.030.000 | 50% | 28.800.000 | 50,00 | 32,72 |
| 4 01 01 1.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara | 1 Unit | 39.190.000 | Unit | 12.185.000 | 0,00 | 31,09 |
| 4 01 01 1.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara | 1 Unit | 34.100.000 | Unit | 11.845.000 | 0,00 | 34,74 |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALANAN (TAHUN 2023) YANG DIEVALUASI | | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 | | |
|---------------------|--|---|--|-----------------------|---|--------------------------|---|--------------------|--------------|
| | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | ANGGARAN (Rp) | REALISASI KINERJA | REALISASI ANGGARAN (Rp.) | % CAPAIAN KINERJA | % CAPAIAN ANGGARAN | |
| 4 01 01 1.09 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 21 Unit | 14.740.000 | 9 Unit | 4.770.000 | 42,86 | 32,36 |
| 4 01 02 | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai urusan | | 100% | 1.786.637.450 | 50% | 626.883.854 | 50,00 | 35,09 |
| 4 01 02 1.01 | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai urusan | | 100% | 573.188.150 | 50% | 148.832.998 | 50,00 | 25,97 |
| 4 01 02 1.01 01 | | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | Jumlah produk hukum daerah terkait kelembagaan perangkat daerah yang disusun | 1 Ranperda/ra npergub | 145.784.750 | 4 Ranperda/r anpergub | 55.860.853 | 400,00 | 38,32 |
| 4 01 02 1.01 02 | | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | Persentase jumlah rekomendasi penataan kelembagaan yang dikeluarkan | 80 % | 245.225.200 | 75 % | 53.004.095 | 93,75 | 21,61 |
| 4 01 02 1.01 03 | | Penataan Analisis Jabatan | Persentase Perangkat Daerah yang telah dibina penataan jabatan | 80 % | 182.178.200 | 75 % | 39.968.050 | 93,75 | 21,94 |
| | | | persentase perangkat daerah yang telah dilakukan penataan jabatan | 80 % | | 100 % | | 125,00 | |
| 4 01 02 1.02 | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai urusan | | 100% | 1.213.449.300 | 50% | 478.050.856 | 50,00 | 39,40 |
| 4 01 02 1.02 01 | | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Jumlah Kab/Kota yang dibina/asistensi | 18 Kab/Kota | 227.462.200 | 10 Kab/Kota | 141.886.400 | 55,56 | 62,38 |
| | | | Jumlah peserta bimtek RB Kabupaten/Kota | 84 Orang | | 84 Orang | | 100,00 | |
| | | | Jumlah Peserta Sosialisasi RB | 102 Orang | | 102 Orang | | 100,00 | |
| | | | Rancangan Pergub Road Map RB Tematik | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 100,00 | |
| 4 01 02 1.02 02 | | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Jumlah Dokumen Analisa Akuntabilitas Kinerja yang disusun | 1 Dokumen | 207.505.000 | 1 Dokumen | 76.537.300 | 100,00 | 36,88 |
| | | | Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah yang disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 100,00 | |
| | | | Jumlah Kab/Kota yang di coaching/asistensi Dokumen SAKIPNYA | 2 Kab/Kota | | 1 Kab/Kota | | 50,00 | |
| | | | Jumlah Money Pencapaian Target Perjanjian Kinerja OPD yang dilaksanakan | 2 Kali | | Kali | | 0,00 | |

Berdasarkan tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 diatas, secara umum realisasi serapan anggaran baru mencapai 41,06% dan realisasi kinerja 50,85. Hal ini disebabkan antara lain karena:

1. Ketidakkonsistenan terhadap perencanaan kas yang sudah disusun.
2. Adanya perubahan jadwal kegiatan-kegiatan yang ada pada Biro Organisasi sehingga tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan

Berdasarkan kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2023 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2023 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada mekanisme Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil terhadap hal tersebut di atas adalah:

1. Optimalisasi menjaga konsistensi target-target kinerja perencanaan dan penganggaran.
2. Melakukan penyesuaian/perubahan terhadap indikator dan target kinerja serta kerangka pendanaan Renja terutama terhadap target kinerja sub kegiatan yang belum terpenuhi namun alokasi anggarannya masih tersedia maupun penambahan alokasi anggaran pada target kinerja yang belum terlampaui melalui mekanisme pergeseran antar program/kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana kerja Awal Biro Organisasi Tahun 2023 disusun dalam rangka pencapaian target indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2023. Penyusunan perubahan rencana kerja ini dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran serta hal-hal dari berbagai faktor yang akan dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran strategis tersebut. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan atau merencanakan program dan kegiatan tahun 2023 disesuaikan/diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelancaran administrasi perkantoran dilingkungan Biro. Untuk kelancaran proses administrasi perkantoran diperlukan adanya program dan kegiatan yang menunjang terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan yang menjadi tanggung jawab Biro.
2. Pencapaian misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu khusus kepada misi 7 dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, Akuntabel serta berkualitas dengan Program dan kegiatan yang dirumuskan untuk menunjang pencapaian misi tersebut dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas serta pelayanan publik.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan merealisasikan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan tujuan untuk suatu periode sebagai suatu ukuran keadaan yang ingin diwujudkan dalam skala periode terbatas (sampai dengan lima tahun). Tujuan akan menentukan bagian- bagian tujuan yang lebih pendek atau sasaran yang akan diwujudkan sebagai indikator dapat tidaknya suatu tujuan terwujud. Tujuan

merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi.

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rancangan Perubahan Renja Awal Biro Organisasi
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun - |
|----|--|---|--|---|
| | | | | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan | Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran | Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran | 100 |
| | | | Persentase Kab/Kota yang OPDnya tepat Fungsi dan tepat ukuran | 100 |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A | 10 |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah | Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah | 12,7 |
| 3. | Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi | Meningkatnya Pelaksanaan Area Manajemen Perubahan | Hasil Penilaian Mandiri Area Manajemen Perubahan | 1,85 |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas | Jumlah Inovasi Pelayanan Publik lolos saringan Kompetisi secara nasional | 9 |
| | | Penataan Ketatalaksanaan yang efektif | Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan | 16 |
| 5 | Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi | Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi | A (81) |

| | | | | |
|--|--|---|---|-----------|
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi | Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi | 86 (Baik) |
|--|--|---|---|-----------|

3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023

Kerangka kerja dan pendanaan pada Rancangan Perubahan Renja Awal Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan kerangka kerja Pembangunan Daerah (RKPD-P) Tahun 2023 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat daerah maupun menunjang terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.

Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2023 yang terdapat pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023 tercantum sebagaimana pada tabel berikut:

TABEL 3.1
REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD BIRO ORGANISASI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023
PROVINSI SUMATERA BARAT

NAMA OPD : BIRO ORGANISASI

| No. | RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|-----------------|---|----------|--|--------------------------|--|---|----------|--|--------------------------|--|
| | PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN INDIKATOR | PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN (Rp.) | PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN INDIKATOR | PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Provinsi | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100% | 1.347.881.904 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Provinsi | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100% | 1.347.881.904 |
| 4.01.01.1.01 | 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Provinsi | Persentase Terlaksananya Penyusunan Laporan | 100% | 9.671.500 | 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Provinsi | Persentase Terlaksananya Penyusunan Laporan | 100% | 9.671.500 |
| 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun | 1 Dokumen | 1.533.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun | 1 Dokumen | 1.533.000 |
| 4.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun | 1 Dokumen | 1.669.600 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun | 1 Dokumen | 1.669.600 |
| 4.01.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun | 1 Dokumen | 4.503.500 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun | 1 Dokumen | 4.503.500 |
| 4.01.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun | 1 Dokumen | 1.965.400 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun | 1 Dokumen | 1.965.400 |
| 4.01.01.1.02 | 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan | 100% | 68.635.000 | 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan | 100% | 68.635.000 |
| 4.01.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah ASN yang mendapatkan honorarium | 7 Orang | 68.100.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah ASN yang mendapatkan honorarium | 7 Orang | 68.100.000 |
| 4.01.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | | Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan yang disiapkan | 1 Laporan | 535.000 | Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | | Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan yang disiapkan | 1 Laporan | 535.000 |
| 4.01.01.1.03 | 3 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | Persentase Barang Milik Daerah yang tertibkan | 100% | 1.806.500 | 3 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | Persentase Barang Milik Daerah yang tertibkan | 100% | 1.806.500 |
| 4.01.01.1.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD | | Jumlah Dokumen hasil pemantauan dan penerbitan | 1 Dokumen | 1.148.600 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD | | Jumlah Dokumen hasil pemantauan dan penerbitan | 1 Dokumen | 1.148.600 |
| | | | Jumlah pengelolaan BMD SKPD yang dibayarkan honornya | 1 Orang | | | | Jumlah pengelolaan BMD SKPD yang dibayarkan honornya | 1 Dokumen | |
| 4.01.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | Jumlah Dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD | 1 Dokumen | 657.900 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | Jumlah Dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD | 1 Dokumen | 657.900 |
| 4.01.01.1.05 | 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 100% | 10.000.000 | 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 100% | 10.000.000 |
| 4.01.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah Bimtek yang diikuti | 1 Bimtek | 10.000.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah Bimtek yang diikuti | 1 Bimtek | 10.000.000 |
| 4.01.01.1.06 | 5 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Terpenuhinya kebutuhan ATK, dan Kebutuhan makan minum rapat serta perjalanan dinas | 12 Bulan | 721.680.280 | 5 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Terpenuhinya kebutuhan ATK, dan Kebutuhan makan minum rapat serta perjalanan dinas | 12 Bulan | 721.680.280 |
| 4.01.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan | 31 Bahan | 31.675.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan | 31 Bahan | 31.675.000 |
| 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 12 Barang | 35.024.700 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 12 Barang | 35.024.700 |
| 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi | 100 Laporan | 654.980.580 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi | 100 Laporan | 654.980.580 |

| No. | RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--|--|--------------------------|--|--------------------------------|--|--|--------------------------|--|
| | PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN INDIKATOR | PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN (Rp.) | PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN INDIKATOR | PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN (Rp.) |
| 4.01.01.1.07 | 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor | 100% | 362.918.580 | 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor | 100% | 362.918.580 |
| 4.01.01.1.07.05 | | Pengadaan Mebel | Jumlah mebel baru yang disediakan | 31 Unit, Set | 151.313.300 | | Pengadaan Mebel | Jumlah mebel baru yang disediakan | 31 Unit, Set | 151.313.300 |
| 4.01.01.1.07.06 | | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru | 17 Unit | 211.605.280 | | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru | 17 Unit | 211.605.280 |
| 4.01.01.1.08 | 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 85.140.044 | 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 85.140.044 |
| 4.01.01.1.08.01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat-surat masuk dan surat surat keluar dalam 1 tahun | 500 Surat | 8.187.500 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat-surat masuk dan surat surat keluar dalam 1 tahun | 500 Surat | 8.187.500 |
| 4.01.01.1.08.02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Kapasitas tagihan internet yang dibayarkan | 12 Bulan | 3.000.000 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Kapasitas tagihan internet yang dibayarkan | 12 Bulan | 3.000.000 |
| 4.01.01.1.08.04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia | 2 Orang | 73.952.544 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia | 2 Orang | 73.952.544 |
| 4.01.01.1.09 | 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100% | 88.030.000 | 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100% | 88.030.000 |
| 4.01.01.1.09.01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara | 1 Unit | 39.190.000 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara | 1 Unit | 39.190.000 |
| 4.01.01.1.09.02 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara | 1 Unit | 34.100.000 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara | 1 Unit | 34.100.000 |
| 4.01.01.1.09.06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 21 Unit | 14.740.000 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 21 Unit | 14.740.000 |
| II | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | | Persentase Kab/Kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran | 100% | 1.786.637.450 | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | | Persentase Kab/Kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran | 100% | 1.937.371.950 |
| | | | Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran | 100% | | | | Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran | 100% | |
| | | | Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran | 100% | | | | Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran | 100% | |
| 4.01.02.1.01 | 9 | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Persentase meningkatnya penataan kelembagaan dan jabatan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur | 100% | 573.188.150 | 9 | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Persentase meningkatnya penataan kelembagaan dan jabatan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur | 100% | 627.403.400 |
| | | | Persentase OPD yang pembentukannya sesuai perundang-undangan kelembagaan | 90% | | | | Persentase OPD yang pembentukannya sesuai perundang-undangan kelembagaan | 90% | |
| 4.01.02.1.01.01 | | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | Jumlah produk hukum daerah terkait kelembagaan perangkat daerah yang disusun | 1 Ranperda/Ranpergub | 145.784.750 | | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | Jumlah produk hukum daerah terkait kelembagaan perangkat daerah yang disusun | 1 Ranperda/Ranpergub | 200.000.000 |
| 4.01.02.1.01.02 | | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | Persentase Jumlah Rekomendasi Penataan Kelembagaan yang dikeluarkan | 80% | 245.225.200 | | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | Persentase Jumlah Rekomendasi Penataan Kelembagaan yang dikeluarkan | 80% | 245.225.200 |
| 4.01.02.1.01.03 | | Penataan Analisis Jabatan | Persentase perangkat daerah yang telah dibina penataan jabatan | 80% | 182.178.200 | | Penataan Analisis Jabatan | Persentase perangkat daerah yang telah dibina penataan jabatan | 80% | 182.178.200 |
| | | | Persentase perangkat daerah yang telah dilakukan penataan jabatan | 80% | | | | Persentase perangkat daerah yang telah dilakukan penataan jabatan | 80% | |

| No. | RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | |
|-----------------|---|---|---|--------------------------|--|---|---|---|--------------------------|--|
| | PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN INDIKATOR | PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN (Rp.) | PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN INDIKATOR | PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN (Rp.) |
| 4.01.02.1.02 | 10 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | Nilai Komponen pemenuhan untuk 4 Area Perubahan Reformasi Birokrasi (Area Manajemen Perubahan, Penguatan Akuntabilitas, Penataan Tatalaksana, Pelayanan Publik) | 5 Skor | 1.213.449.300 | 10 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | Nilai Komponen pemenuhan untuk 4 Area Perubahan Reformasi Birokrasi (Area Manajemen Perubahan, Penguatan Akuntabilitas, Penataan Tatalaksana, Pelayanan Publik) | 5 Skor | 1.309.968.550 |
| 4.01.02.1.02.01 | | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Jumlah Kab/Kota yang dibina/Asistensi | 18 Kab/Kota | 227.462.200 | | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Jumlah Kab/Kota yang dibina/Asistensi | 18 Kab/Kota | 227.462.200 |
| | | | Jumlah Peserta Bimtek RB Kab/Kota | 84 Orang | | | | Jumlah Peserta Bimtek RB Kab/Kota | 84 Orang | |
| | | | Jumlah Peserta Sosialisasi Reformasi Birokrasi | 102 Orang | | | | Jumlah Peserta Sosialisasi Reformasi Birokrasi | 102 Orang | |
| | | | Rancangan Pergub Road Map RB Tematik | 1 Dokumen | | | | Rancangan Pergub Road Map RB Tematik | 1 Dokumen | |
| 4.01.02.1.02.02 | | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Jumlah Dokumen Analisa Akuntabilitas Kinerja yang disusun | 1 Dokumen | 207.505.000 | | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Jumlah Dokumen Analisa Akuntabilitas Kinerja yang disusun | 1 Dokumen | 207.505.000 |
| | | | Jumlah dokumen perjanjian kinerja pemerintah yang disusun | 1 Dokumen | | | | Jumlah dokumen perjanjian kinerja pemerintah yang disusun | 1 Dokumen | |
| | | | Jumlah Kabupaten/Kota yang dicoaching/asistensi Dokumen SAKIPNYA | 2 Kab/Kota | | | | Jumlah Kabupaten/Kota yang dicoaching/asistensi Dokumen SAKIPNYA | 2 Kab/Kota | |
| | | | Jumlah Money Pencapaian Target Perjanjian Kinerja OPD yang dilaksanakan | 2 Kali | | | | Jumlah Money Pencapaian Target Perjanjian Kinerja OPD yang dilaksanakan | 2 Kali | |
| | | | Jumlah perangkat daerah yang dibina dalam implementasi SAKIP | 51 OPD | | | | Jumlah perangkat daerah yang dibina dalam implementasi SAKIP | 51 OPD | |
| | | | Jumlah peserta percepatan implementasi SAKIP Prov.SUMBAR | 110 Orang | | | | Jumlah peserta percepatan implementasi SAKIP Prov.SUMBAR | 110 Orang | |
| 4.01.02.1.02.03 | | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | Internalisasi ASN berakhlak ASN pemerintah Provinsi Sumatera Barat | 142 Peserta | 103.480.750 | | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | Internalisasi ASN berakhlak ASN pemerintah Provinsi Sumatera Barat | 152 Peserta | 200.000.000 |
| 4.01.02.1.02.04 | | Pengelolaan Tatalaksana Pemeintahan | Jumlah perangkat daerah yang dibina dalam penyusunan Probis | 8 Perangkat Daerah | 195.994.950 | | Pengelolaan Tatalaksana Pemeintahan | Jumlah perangkat daerah yang dibina dalam penyusunan Probis | 8 Perangkat Daerah | 195.994.950 |
| | | | Jumlah perangkat daerah yang dibina dalam penyusunanSOP | 8 Perangkat Daerah | | | | Jumlah perangkat daerah yang dibina dalam penyusunanSOP | 8 Perangkat Daerah | 0 |
| | | | Jumlah terlaksananya pembinaan SOP dan Probis Kab/Kota | 7 Perangkat Daerah | | | | Jumlah terlaksananya pembinaan SOP dan Probis Kab/Kota | 7 Perangkat Daerah | 0 |
| | | | Peserta rapat koordinasi Kab/Kota | 112 Orang | | | | Peserta rapat koordinasi Kab/Kota | 112 Orang | 0 |
| 4.01.02.1.02.05 | | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | Jumlah Peserta digitalisasi pelayanan publik | 150 Orang | 479.006.400 | | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | Jumlah Peserta digitalisasi pelayanan publik | - | 479.006.400 |
| | | | Jumlah UKPP Provinsi yang dibina Standar Sarana dan Prasarana | 70 UKPP | | | | Jumlah UKPP Provinsi yang dibina Standar Sarana dan Prasarana | 70 UKPP | |
| | | | Jumlah UKPP yang menerapkan SIPP | 30 UKPP | | | | Jumlah UKPP yang menerapkan SIPP | 30 UKPP | |
| | | | Jumlah UKPP yang menerapkan Standar Pelayanan | 30 UKPP | | | | Jumlah UKPP yang menerapkan Standar Pelayanan | 30 UKPP | |
| | | | Jumlah UKPP yang mengikuti Kompetisi | 30 UKPP | | | | Jumlah UKPP yang mengikuti Kompetisi | 30 UKPP | |

3.3 Kerangka Kerja dan Pendanaan pada Rancangan Perubahan Awal Renja Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2023 serta berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan sampai dengan kondisi Triwulan II Tahun 2023, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun tabel perbandingan sebagaimana diilustrasikan pada tabel berikut:

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BIRO ORGANISASI PROVINSI SUMATERA BARAT
BERDASARKAN PERUBAHAN RKPd TAHUN 2023

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN | | | | | INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN | | INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SETELAH | | PAGU ANGGARAN AWAL (Rp.) | PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.) | BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.) | |
|-----------------------------|---|----|---|----|----|---|---|--|---|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|
| | | | | | | INDIKATOR | TARGET INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET INDIKATOR | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH | | | | | | | | | | 3.134.519.354 | 3.134.519.354 | 0 | |
| 4 | 01 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100% | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100% | 1.347.881.904 | 1.347.881.904 | 0 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | Persentase terlaksananya penyusunan laporan | 100% | 9.671.500 | 9.671.500 | 0 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun | 1 Dokumen | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun | 1 Dokumen | 1.533.000 | 1.533.000 | 0 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun | 1 Dokumen | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun | 1 Dokumen | 1.669.600 | 1.669.600 | 0 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun | 1 Dokumen | Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun | 1 Dokumen | 4.503.500 | 4.503.500 | 0 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun | 1 Dokumen | Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun | 1 Dokumen | 1.965.400 | 1.965.400 | 0 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | Persentase terlaksananya Pelayanan Administasi Keuangan | 100% | 68.635.000 | 68.635.000 | 0 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan honorarium | 7 Orang | Jumlah ASN yang mendapatkan honorarium | 7 Orang | 68.100.000 | 68.100.000 | 0 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan yang disiapkan | 1 Laporan | Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan yang disiapkan | 1 Laporan | 535.000 | 535.000 | 0 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | Persentase Barang Milik Daerah yang ditertibkan | 100% | 1.806.500 | 1.806.500 | 0 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 03 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD | Jumlah Dokumen hasil pemantauan dan penerbitan | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen hasil pemantauan dan penerbitan | 1 Dokumen | 1.148.600 | 1.148.600 | 0 |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN | | INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SETELAH | | PAGU ANGGARAN AWAL (Rp.) | PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.) | BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.) | |
|------|---|--|--|--|---|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------|
| | | INDIKATOR | TARGET INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET INDIKATOR | | | | |
| | | Jumlah pengelolaan BMD SKPD yang dibayarkan honorinya | 1 Orang | Jumlah pengelolaan BMD SKPD yang dibayarkan honorinya | 1 Orang | | | 0 | |
| 4 | 01 01 1 03 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD | 1 Dokumen | 657.900 | 657.900 | 0 |
| 4 | 01 01 1 05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100% | Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 100% | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 4 | 01 01 1 05 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bimtek yang diikuti | 1 Bimtek | Jumlah Bimtek yang diikuti | 1 Bimtek | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 4 | 01 01 1 06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | Terpenuhinya kebutuhan ATK, dan Kebutuhan Makan Minum Rapat serta Perjalanan Dinas | 100% | 721.680.280 | 721.680.280 | 0 |
| 4 | 01 01 1 06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 31 Bahan | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 31 Bahan | 31.675.000 | 31.675.000 | 0 |
| 4 | 01 01 1 06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 12 Barang | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 12 Barang | 35.024.700 | 35.024.700 | 0 |
| 4 | 01 01 1 06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi | 100 Laporan | Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi | 100 Laporan | 654.980.580 | 654.980.580 | 0 |
| 4 | 01 01 1 07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor | 100% | 362.918.580 | 362.918.580 | 0 |
| 4 | 01 01 1 07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah mebel baru yang disediakan | 31 Unit, Set | Jumlah mebel baru yang disediakan | 31 Unit, Set | 151.313.300 | 151.313.300 | 0 |
| 4 | 01 01 1 07 06 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru | 17 Unit | Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru | 17 Unit | 211.605.280 | 211.605.280 | 0 |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN | | | | | INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN | | INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SETELAH | | PAGU ANGGARAN AWAL (Rp.) | PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.) | BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.) | |
|------|---|----|---|----|----|--|--|--|---|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | | INDIKATOR | TARGET INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET INDIKATOR | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 85.140.044 | 85.140.044 | 0 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat-surat masuk dan surat surat keluar dalam 1 tahun | 500 Surat | Jumlah surat-surat masuk dan surat surat keluar dalam 1 tahun | 500 Surat | 8.187.500 | 8.187.500 | 0 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Kapasitas tagihan internet yang dibayarkan | 12 Bulan | Jumlah Kapasitas tagihan internet yang dibayarkan | 12 Bulan | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia | 2 Orang | Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia | 2 Orang | 73.952.544 | 73.952.544 | 0 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah | 100% | 88.030.000 | 88.030.000 | 0 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara | 1 Unit | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara | 1 Unit | 39.190.000 | 39.190.000 | 0 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara | 1 Unit | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara | 1 Unit | 34.100.000 | 34.100.000 | 0 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 21 Unit | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 21 Unit | 14.740.000 | 14.740.000 | 0 |
| 4 | 01 | 02 | | | | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | Persentase Pembentukan Perangkat Daerah sesuai urusan | 100% | Persentase Kab/Kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran | 100% | 1.786.637.450 | 1.786.637.450 | 0 |
| | | | | | | | | | Persentase Penataan Jabatan Perangkat Daerah | 100% | | | |
| | | | | | | | | | Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran | 100% | | | |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN | | | | | INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN | | INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SETELAH | | PAGU ANGGARAN AWAL (Rp.) | PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.) | BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.) | |
|------|---|----|---|----|----|--|--|--|--|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | | INDIKATOR | TARGET INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET INDIKATOR | | | | |
| 4 | 01 | 02 | 1 | 01 | | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Persentase Pembentukan Perangkat Daerah sesuai urusan | 100% | Persentase Meningkatnya penataan kelembagaan dan jabatan perangkat daerah yang tepat | 100% | 573.188.150 | 573.188.150 | 0 |
| | | | | | | | | | Persentase OPD yang pembentukan sesuai perundang-undangan kelembagaan | 100% | | | |
| 4 | 01 | 02 | 1 | 01 | 01 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | Jumlah produk hukum daerah terkait kelembagaan perangkat daerah yang disusun | 1 Ranperda/Ranpergub | Jumlah produk hukum daerah terkait kelembagaan perangkat daerah yang disusun | 1 Ranperda/Ranpergub | 145.784.750 | 145.784.750 | 0 |
| 4 | 01 | 02 | 1 | 01 | 02 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | Persentase Jumlah rekomendasi penataan kelembagaan yang dikeluarkan | 80% | Persentase Jumlah rekomendasi penataan kelembagaan yang dikeluarkan | 80% | 245.225.200 | 245.225.200 | 0 |
| 4 | 01 | 02 | 1 | 01 | 03 | Penataan Analisis Jabatan | Persentase perangkat daerah yang telah dilakukan penataan jabatan | 80% | Persentase perangkat daerah yang telah dilakukan penataan jabatan | 80% | 182.178.200 | 182.178.200 | 0 |
| | | | | | | | Persentase perangkat daerah yang telah dilakukan penataan jabatan | 1 Laporan | Persentase perangkat daerah yang telah dilakukan penataan jabatan | 1 Laporan | | | 0 |
| 4 | 01 | 02 | 1 | 02 | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Persentase Pembentukan Perangkat Daerah sesuai urusan | 100% | Nilai komponen Pemenuhan untuk 4 Area Perubahan Reformasi Birokrasi (Area Manajemen Perubahan, Penguatan Akuntabilitas, Penataan Tatalaksana, Pelayanan Publik) | 5 skor | 1.213.449.300 | 1.213.449.300 | 0 |
| 4 | 01 | 02 | 1 | 02 | 01 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Jumlah Kab/Kota yang dibina/Asistensi | 18 Kab/Kota | Jumlah Kab/Kota yang dibina/Asistensi | 18 Kab/Kota | 227.462.200 | 227.462.200 | 0 |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimtek RB Kab/Kota | 84 Orang | Jumlah Peserta Bimtek RB Kab/Kota | 84 Orang | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Sosialisasi Reformasi Birokrasi | 102 Orang | Jumlah Peserta Sosialisasi Reformasi Birokrasi | 102 Orang | | | |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN | | INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SETELAH | | PAGU ANGGARAN AWAL (Rp.) | PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.) | BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.) | | | | | |
|------|---|--|------------------|--|------------------|---|---|---------------------------|---|--------------------|-------------|-------------|---|
| | | INDIKATOR | TARGET INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET INDIKATOR | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 02 | 1 | 02 | 02 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Jumlah Dokumen Analisa Akuntabilitas Kinerja yang disusun | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen Analisa Akuntabilitas Kinerja yang disusun | 1 Dokumen | 207.505.000 | 207.505.000 | 0 |
| | | | | | | | Jumlah dokumen perjanjian kinerja pemerintah yang disusun | 1 Dokumen | Jumlah dokumen perjanjian kinerja pemerintah yang disusun | 1 Dokumen | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kabupaten/Kota yang dicoaching/asistensi Dokumen SAKIPNYA | 2 Kab/Kota | Jumlah Kabupaten/Kota yang dicoaching/asistensi Dokumen SAKIPNYA | 2 Kab/Kota | | | |
| | | | | | | | Jumlah Monev Pencapaian Target Perjanjian Kinerja OPD yang dilaksanakan | 2 Kali | Jumlah Monev Pencapaian Target Perjanjian Kinerja OPD yang dilaksanakan | 2 Kali | | | |
| | | | | | | | Jumlah perangkat daerah yang dibina dalam implementasi SAKIP | 51 OPD | Jumlah perangkat daerah yang dibina dalam implementasi SAKIP | 51 OPD | | | |
| | | | | | | | Jumlah peserta percepatan implementasi SAKIP Prov.SUMBAR | 110 Orang | Jumlah peserta percepatan implementasi SAKIP Prov.SUMBAR | 110 Orang | - | | |
| 4 | 01 | 02 | 1 | 02 | 03 | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | Internalisasi ASN berakhlak ASN pemerintah Prov.SUMBAR | 142 Peserta | Internalisasi ASN berakhlak ASN pemerintah Prov.SUMBAR | 142 Peserta | 103.480.750 | 103.480.750 | 0 |
| 4 | 01 | 02 | 1 | 02 | 04 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | Jumlah perangkat daerah yang dibina dalam penyusunan Probis | 8 Perangkat Daerah | Jumlah perangkat daerah yang dibina dalam penyusunan Probis | 8 Perangkat Daerah | 195.994.950 | 195.994.950 | 0 |
| | | | | | | | Jumlah perangkat daerah yang dibina dalam penyusunan SOP | 8 Perangkat Daerah | Jumlah perangkat daerah yang dibina dalam penyusunan SOP | 8 Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | Jumlah terlaksananya pembinaan SOP dan Probis Kab/Kota | 7 Perangkat Daerah | Jumlah terlaksananya pembinaan SOP dan Probis Kab/Kota | 7 Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | Peserta rapat koordinasi Kab/Kota | 112 Orang | Peserta rapat koordinasi Kab/Kota | 112 Orang | | | |

| KODE | | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN | | INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SETELAH | | PAGU ANGGARAN AWAL (Rp.) | PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.) | BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.) | |
|------|----|----|---|----|----|---|--|------------------|---|------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|
| | | | | | | | INDIKATOR | TARGET INDIKATOR | INDIKATOR | TARGET INDIKATOR | | | | |
| 4 | 01 | 02 | 1 | 02 | 05 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | Jumlah Peserta digitalisasi pelayanan publik | 150 Orang | Jumlah Peserta digitalisasi pelayanan publik | 150 Orang | 479.006.400 | 479.006.400 | 0 | |
| | | | | | | | Jumlah UKPP Provinsi yang dibina Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan | 70 UKPP | Jumlah UKPP Provinsi yang dibina Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan | 70 UKPP | | | | |
| | | | | | | | Jumlah UKPP yang menerapkan SIPP | 30 UKPP | Jumlah UKPP yang menerapkan SIPP | 30 UKPP | | | | |
| | | | | | | | Jumlah UKPP yang menerapkan Standar Pelayanan | 30 UKPP | Jumlah UKPP yang menerapkan Standar Pelayanan | 30 UKPP | | | | |
| | | | | | | | Jumlah UKPP yang mengikuti Kompetisi | 30 UKPP | Jumlah UKPP yang mengikuti Kompetisi | 30 UKPP | | | | |

B A B IV P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Awal Biro Organisasi Tahun 2023 disusun dalam rangka pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2023. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja awal ini dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan kemampuan sumber daya yang tersedia beserta berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Anggaran Biro Organisasi Tahun 2023 sebesar Rp. **3.134.519.354,-** dengan 2 Program, 10 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan. Dan pada Anggaran Perubahan Awal Biro Organisasi Tahun 2023 masih dengan anggaran sebesar Rp. **3.134.519.354,-** , yang berarti Biro Organisasi tidak melakukan penambahan dan pengurangan anggaran.

Demikian Perubahan Rencana Kerja awal Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 ini diajukan untuk dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

KEPALA BIRO ORGANISASI



FITRIATI.M,S.SI,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730513 199703 2 005